



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Page 2757-2769

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Akuntansi Forensik dalam Mendeteksi Fraud Pada Sektor Pemerintahan

Desi Erianti^{1✉}, Nurul Hidayah², Siti Syarah³, Joni Hendra K⁴

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)

Email: bursahp1018@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Makalah ini membahas peran akuntansi forensik dalam mendeteksi dan mencegah fraud di sektor pemerintahan, yang merupakan masalah kompleks dengan dampak luas terhadap keuangan negara dan kepercayaan publik. Dalam upaya memahami fenomena ini, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa adanya peningkatan kasus fraud, termasuk penyalahgunaan anggaran dan kolusi, memerlukan metode efektif untuk penanganannya. Akuntansi forensik, dengan teknik analisis mendalam seperti analisis rasio dan pemeriksaan transaksi, terbukti efektif dalam mendeteksi anomali dalam laporan keuangan. Makalah ini juga menyoroti tantangan dalam implementasi akuntansi forensik serta pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam menciptakan kesadaran dan keterampilan yang diperlukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi dan budaya anti-korupsi sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel di sektor publik.

Kata Kunci: *Akuntansi Forensik, Fraud, Sektor Pemerintahan, Deteksi Kecurangan, Pencegahan Korupsi, Transparansi, Kepercayaan Publik*

Abstract

This paper discusses the role of forensic accounting in detecting and preventing fraud in the government sector, which is a complex problem with broad impacts on state finances and public trust. In an effort to understand this phenomenon, this research uses a qualitative method with a literature study approach. The data obtained shows that the increase in fraud cases, including budget abuse and collusion, requires effective methods for handling them. Forensic accounting, with in-depth analytical techniques such as ratio analysis and transaction examination, has proven effective in detecting anomalies in financial statements. The paper also highlights the challenges in the implementation of forensic accounting as well as the importance of collaboration between the government, academia and the public in creating the necessary awareness and skills. The results show that anti-corruption education and culture are needed to create a more transparent and accountable environment in the public sector.

Keywords: Forensic Accounting, Fraud, Government Sector, Fraud Detection, Corruption Prevention, Transparency, Public Trust

PENDAHULUAN

Fraud di sektor publik adalah masalah rumit yang memiliki konsekuensi luas, tidak hanya untuk situasi keuangan negara secara keseluruhan, tetapi juga untuk kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah penelitian yang diterbitkan oleh Transparency International (2022), aktivitas kecurangan di sektor publik berpotensi mengakibatkan kerugian finansial yang cukup besar, menodai reputasi pemerintah, dan menimbulkan ketidakstabilan sosial. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya membangun pendekatan yang efektif dan terjangkau untuk mendeteksi dan mencegah tindakan kecurangan. Hal ini menjadi perhatian utama di Indonesia bahwa sektor pemerintah rentan terhadap kecurangan. Informasi yang diperoleh dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan jumlah kasus kecurangan yang ditemukan selama beberapa tahun terakhir (BPKP, 2023). Kasus-kasus tersebut umumnya berupa penyalahgunaan dana, penggelapan, dan kerja sama, yang semuanya menyebabkan kerugian keuangan yang besar bagi negara. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang holistik untuk menyelesaikan masalah ini.

Dalam beberapa tahun terakhir, akuntansi forensik telah berkembang sebagai metode yang layak untuk mendeteksi dan menyelidiki aktivitas penipuan. Mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan bukti praktik kecurangan adalah tujuan dari bidang ini, yang menggabungkan akuntansi, audit, dan prosedur investigasi (Garrison, 2020). Dengan

menggunakan metodologi ini, akuntansi forensik memiliki potensi untuk membantu para pengambil keputusan dalam mengidentifikasi contoh-contoh kecurangan yang mungkin tidak terlihat dalam laporan keuangan standar. Studi mendalam tentang data keuangan adalah salah satu manfaat yang ditawarkan akuntansi forensik. Ini adalah salah satu keunggulan akuntansi forensik. Menurut Singleton dan Singleton (2018), metode seperti analisis rasio, analisis tren, dan investigasi transaksi dapat digunakan untuk membantu dalam mengidentifikasi ketidaknormalan yang mungkin merupakan indikasi aktivitas penipuan. Melalui penggunaan metodologi ini, auditor forensik dapat menawarkan wawasan berharga yang dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih baik dalam administrasi sumber daya publik.

Sebagai manfaat lebih lanjut, penerapan akuntansi forensik bertindak sebagai disinsentif bagi mereka yang melakukan kecurangan. Menurut Kranacher et al. (2011), kemungkinan terjadinya kecurangan dapat dimitigasi dengan menerapkan sistem pengawasan yang lebih efektif dan meningkatkan tingkat keterbukaan. Praktik akuntansi forensik tidak hanya berfokus pada pendeteksian, tetapi juga pada pencegahan kecurangan, yang menghasilkan penciptaan lingkungan yang lebih aman untuk pengelolaan anggaran publik. Namun demikian, tidak mungkin untuk mengabaikan kesulitan-kesulitan yang ada dalam mempraktikkan akuntansi forensik di sektor publik. (Albrecht et al., 2019) Sejumlah besar lembaga pemerintah masih memiliki kekurangan dalam pemahaman mereka tentang pentingnya akuntansi forensik dan dalam penyediaan sumber daya yang memadai untuk pelaksanaannya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesadaran dan meningkatkan kemampuan di bidang ini, pemerintah, lembaga pendidikan, dan kelompok non-pemerintah perlu bekerja sama.

Taktik penipuan menjadi lebih rumit seiring dengan pertumbuhan teknologi informasi. Menurut Wells (2020), para penipu sekarang menggunakan metode yang lebih kompleks, seperti pemrograman komputer dan manipulasi data, sehingga lebih sulit untuk mengenali aktivitas penipuan mereka. Oleh karena itu, akuntansi forensik perlu menyesuaikan diri dengan kemajuan ini, termasuk penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendeteksian kecurangan. Menurut temuan studi yang dilakukan oleh Beasley dkk. (2018), banyak negara telah menerapkan prosedur akuntansi forensik untuk meningkatkan tingkat pengawasan dan transparansi yang digunakan oleh sektor publik. Singapura dan Australia adalah dua contoh negara yang telah berhasil mengadopsi sistem akuntansi forensik yang sangat baik. Sistem-sistem ini dapat menjadi contoh untuk diikuti oleh negara-negara lain, termasuk Indonesia.

Memperoleh wawasan yang signifikan dalam proses pengembangan teknik yang lebih efektif untuk mencegah kecurangan dapat dicapai dengan belajar dari praktik-praktik global ini.

Kasus-kasus yang melibatkan penyalahgunaan wewenang adalah area lain di mana pentingnya akuntansi forensik menjadi jelas. Akuntansi forensik memiliki potensi untuk menjelaskan sejumlah besar kasus korupsi di Indonesia, seperti yang dinyatakan dalam laporan yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (KPK, 2022). Bukti-bukti yang disajikan di sini menunjukkan bahwa metode akuntansi forensik memiliki potensi untuk menjadi instrumen yang efisien untuk memerangi korupsi di sektor publik. Dalam hal pendidikan, pengembangan kurikulum yang menggabungkan akuntansi forensik adalah hal yang sangat penting. Sejumlah lembaga pendidikan di Indonesia mulai menyediakan kursus akuntansi forensik untuk membekali lulusannya dengan keterampilan yang diperlukan untuk bekerja secara efektif di bidang ini (Halim, 2021). Dengan menyediakan individu dengan tingkat pendidikan yang sesuai, diharapkan akan lahir tenaga-tenaga profesional yang mampu mengidentifikasi dan mencegah terjadinya kecurangan di sektor publik.

Selain itu, penting untuk mengedukasi masyarakat umum tentang konsekuensi dari kecurangan dan pentingnya akuntansi forensik. Untuk mencapai transparansi yang lebih baik, masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pengawasan (Sari, 2023). Melalui partisipasi masyarakat umum, diharapkan akan terbentuk budaya anti-korupsi yang lebih kuat di seluruh lapisan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, di mana tinjauan literatur digunakan sebagai metode pengumpulan data. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki data sekunder berupa kegiatan penipuan, seperti korupsi dan pencurian identitas. Melalui pemanfaatan dokumen-dokumen yang menguatkan atau catatan harian yang berkaitan dengan masalah penipuan dan korupsi. Teknik penelitian kualitatif, di sisi lain, didefinisikan sebagai alat ukur atau alat kualitatif yang digunakan untuk merefleksikan topik atau objek penelitian (Hughes, 2008). Data dari literatur dikumpulkan dan diperiksa, dan pemahaman tentang penilaian penulis terhadap fungsi Akuntan Forensik dalam menangani masalah korupsi di lembaga pemerintah menjadi pertimbangan.

Dalam penelitian kualitatif ini, pendekatan analisis isi digunakan. Metode ini dirancang untuk mengungkap dan memahami fakta-fakta yang terjadi di lapangan sebagaimana mestinya, yang menjadi pendorong untuk melakukan investigasi secara mendalam dan menyeluruh melalui analisis dan investigasi (Harnovinsah, 2019). Sebagai hasilnya, dapat dikatakan bahwa penelitian ini memiliki potensi untuk menawarkan deskripsi yang komprehensif tentang sejarah, karakteristik, dan kepribadian kasus, yang dapat digunakan sebagai representasi umum (Nazir, 2007). Manfaat tambahan dari penggunaan metode ini adalah kemungkinan untuk melakukan investigasi yang komprehensif dan mendalam terhadap aspek-aspek khusus dan khusus.

Dengan metode dokumentasi dan penggunaan sumber data berupa data sekunder, metodologi pengumpulan data dapat dilakukan. Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan melalui bacaan atau referensi yang berhubungan dengan topik penelitian. Bacaan dan referensi tersebut dapat berupa jurnal, buku, bacaan online, dan referensi literatur lainnya. Sementara itu, metode analisis dilakukan melalui analisis kualitatif, khususnya analisis isi. Analisis isi adalah metodologi yang melibatkan kajian terhadap data yang telah dikumpulkan secara metodis, obyektif, dan digeneralisasikan untuk menghasilkan hasil data yang deskriptif (Mustori, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian akuntansi forensik

Karena terlibat dalam proses mencari berbagai bukti kecurangan, istilah "akuntansi forensik" mengacu pada proses investigasi berbagai praktik kecurangan. Prosedur ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang tidak terkait dengan keuangan dan melakukan wawancara dengan individu yang terlibat dalam aktivitas kecurangan. Tujuan dari penggunaan akuntansi forensik dalam konteks bisnis dan badan publik adalah untuk mengidentifikasi munculnya berbagai jenis kecurangan secara dini, baik yang berasal dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Oleh karena itu, proses pengumpulan bukti-bukti yang kemudian dipresentasikan kepada pihak manajemen atau pengadilan menjadi penekanan utama akuntansi forensik. Oleh karena itu, area pengetahuan seorang akuntan forensik tidak hanya di bidang akuntansi dan audit, tetapi juga di bidang lain seperti investigasi, wawancara, dan analisis keuangan, sampai pada titik di mana mereka berkompoten untuk memberikan kesaksian sebagai saksi ahli dalam kasus-kasus yang dibawa ke pengadilan. Oleh karena itu, seorang akuntan forensik harus memiliki berbagai

keterampilan, kemampuan, dan informasi yang luas dalam kaitannya dengan siklus kecurangan, termasuk kemampuan untuk menyelesaikan perselisihan hukum.

Karena beragamnya keahlian yang dimiliki oleh seorang akuntan forensik, maka ia harus selalu tanggap terhadap berbagai kejadian yang terjadi. Agar peka, seorang akuntan forensik harus mampu mengomentari berbagai kemungkinan yang dapat muncul dalam konteks penipuan. Sejumlah bentuk penyuapan dan korupsi telah menjadi lebih canggih sebagai akibat dari perkembangan digitalisasi. Akuntan forensik harus kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan berbagai sumber informasi untuk mendapatkan bukti keuangan yang relevan. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengevaluasi dan menyajikan bukti dengan cara yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Akuntan yang berspesialisasi dalam akuntansi forensik harus dapat memfasilitasi penyelesaian berbagai keluhan dan rumor dengan cara yang lebih bijaksana dan efektif, atau paling tidak, mereka harus dapat mengurangi gejala kecurangan yang saat ini sedang ramai dibicarakan. Oleh karena itu, seorang akuntan forensik dididik untuk menanggapi berbagai keluhan yang diajukan dalam setiap kasus kejahatan keuangan. Selain itu, mereka juga dilatih untuk tetap waspada selama proses investigasi untuk memastikan bahwa pengumpulan bukti-bukti dapat diselesaikan dengan baik. Meskipun demikian, seorang akuntan forensik harus dapat menjaga independensi dan objektivitas mereka selama investigasi. Dengan kata lain, seorang akuntan forensik harus dapat berbicara dengan pihak-pihak yang terkena dampak dari rumor yang beredar dan pada saat yang sama menekankan pada nilai-nilai ketidakberpihakan dan netralitas untuk memfasilitasi diskusi yang partisipatif (Arianto, dkk., 2023: 4).

Akuntan Forensik Dalam Mendeteksi Fraud Dan Korupsi

Tugas seorang akuntan forensik adalah mengidentifikasi contoh-contoh korupsi. Menurut Teori Fraud Pentagon, keakraban dan keahlian akuntan forensik di bidang ini membuat mereka lebih siap untuk mengidentifikasi contoh-contoh penipuan dan korupsi. Akuntan forensik terbukti secara signifikan meningkatkan deteksi kecurangan, menurut studi oleh Ihulhaq dkk. (2019). Dengan mengurangi kemungkinan kerugian finansial yang lebih parah yang disebabkan oleh korupsi, upaya anti-korupsi membantu bisnis menumbuhkan lingkungan kerja yang produktif dan sehat. Akuntan forensik menyelidiki pertanyaan-pertanyaan tentang aset dan catatan keuangan organisasi dan lembaga. Untuk mengungkap praktik korupsi, para penyelidik memeriksa catatan keuangan yang

merinci semua transaksi yang telah terjadi, dan mereka menindaklanjutinya dengan investigasi kriminal yang menyelidiki cara, tujuan, dan niat pelaku.

Akar penyebab kecurangan dapat diidentifikasi oleh akuntan forensik, menurut penelitian yang dilakukan oleh Lidyah (2016). Temuan dari penelitian ini konsisten dengan penelitian Rizki dkk. (2017), yang menemukan bahwa akuntansi forensik membantu dalam penuntutan kejahatan kerah putih. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan untuk menangkap kejahatan kerah putih akan meningkat jika akuntan forensik memiliki keahlian yang relevan dan menggunakannya secara efektif. Korupsi, penyalahgunaan aset, dan penipuan laporan keuangan adalah tiga jenis utama penipuan. Negara, keuangan, dan ekonominya rentan terhadap ketiga jenis kecurangan ini; oleh karena itu, akuntan forensik memainkan peran penting dalam menyelidiki kasus-kasus kecurangan dengan mengidentifikasi indikator awal kecurangan di dalam organisasi atau lembaga pemerintah. Dengan membantu pengumpulan bukti dan barang bukti untuk digunakan dalam sidang pengadilan dan dengan menggunakan berbagai taktik investigasi secara kreatif, akuntan forensik juga dapat membantu polisi dalam menyelesaikan masalah hukum. Jika dibandingkan dengan investigasi polisi, pengujian akuntansi forensik yang dilakukan dari dalam organisasi dengan menggunakan metode audit prosedural lebih efektif dalam mendeteksi kecurangan (Lidyah, 2016). Akuntan forensik, sebagai bagian dari strategi detektif mereka, telah mengembangkan metode inovatif untuk mendeteksi kegiatan penipuan dengan mengintegrasikan pengetahuan mereka tentang bukti keuangan dari isi transaksi dengan investigasi kriminal dan kemampuan untuk mengamati niat pelaku atau metode operasi (Mursalin, 2013).

Metode investigasi akuntan forensik sangat penting dalam organisasi sektor publik untuk mengidentifikasi contoh-contoh kecurangan dan pelanggaran. Jenitra dan Prihantini (2018) menemukan bahwa akuntansi forensik dapat membantu mengidentifikasi dan menghentikan lembaga pemerintah dari menjadi korban kecurangan. Menurut penelitian Wiharti dan Novita (2020), akuntansi forensik memainkan peran penting dalam mengidentifikasi contoh-contoh kecurangan dalam kontrak pemerintah untuk produk dan jasa.

Akuntan Forensik dan strategi pencegahan fraud dan korupsi

Sangat penting bagi akuntan forensik untuk mengambil langkah-langkah proaktif untuk menghindari penipuan dan korupsi. Penting untuk menyusun rencana pencegahan yang menargetkan akar penyebab kecurangan, yang dalam hal ini adalah kegiatan

korupsi. Penggunaan akuntan forensik diidentifikasi oleh Fikri (2018) sebagai strategi anti-korupsi awal di Indonesia. Untuk membatasi sumber-sumber korupsi, perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan untuk semua penyebab potensial yang telah diketahui. Kecurangan sektor publik dapat dikurangi secara drastis dengan bantuan akuntan forensik, menurut Jenitra & Prihantini (2018). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi dan Nawawi (2020) juga menemukan hal yang sama: audit forensik dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan. Pencegahan kecurangan yang lebih baik dan optimal dapat dilakukan dengan audit forensik yang dilaksanakan dengan baik. Selain melakukan tindakan pencegahan sejak dini, harus ada upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi.

Pemahaman yang mendalam mengenai elemen-elemen yang menyebabkan korupsi sangat penting untuk mengembangkan taktik yang bertujuan untuk mencegah atau mengurangi terjadinya korupsi. Mengetahui apa yang menyebabkan kecurangan, khususnya korupsi, dapat dilakukan dengan bantuan Teori Fraud Pentagon, yang merupakan penjabaran dari Teori Segitiga Fraud Crowe Howarth. Teori fraud Pentagon terdiri dari elemen-elemen berikut: arogansi, kompetensi, kesempatan, rasionalisasi, dan tekanan. Jika seseorang ingin menyusun rencana untuk memerangi korupsi dan kecurangan, mereka harus mengikuti lima prinsip dari Teori Fraud Pentagon, yaitu sebagai berikut:

Menemukan asal mula tekanan adalah penting jika hal tersebut merupakan faktor pendorong tindakan korupsi. Tekanan keuangan adalah salah satu bentuk tekanan ekonomi yang paling luas, tetapi ada juga banyak tekanan yang berasal dari masalah lain yang lebih bersifat pribadi. Bagi Mulyandini dkk. (2023), salah satu definisi tekanan adalah kombinasi antara sumber daya keuangan yang lemah dan biaya hidup yang tinggi, yang dapat membuat seseorang melakukan penipuan. Upaya untuk mengurangi prevalensi korupsi harus dilakukan setelah motivasi di balik korupsi diidentifikasi. Hukuman yang tegas, termasuk peringatan tertulis, dapat digunakan untuk menimbulkan efek jera.

Kemungkinan: Ketika orang yang tidak jujur melakukan kejahatan mereka karena mereka berpikir bahwa sistem yang ada saat ini tidak akan menangkap mereka. Dalam situasi di mana seseorang pada awalnya tidak ingin melakukan kecurangan, tetapi merasa terdorong untuk melakukannya sebagai akibat dari lemahnya kontrol dan pemantauan sistem, sebuah peluang dapat menjadi pemicu terjadinya kecurangan (Mulyandini et al., 2023). Penting untuk mengambil tindakan untuk mencegah korupsi setelah memahami keadaan yang memicunya. Salah satu cara untuk melakukan hal ini adalah dengan

meningkatkan pengawasan internal yang ada di dalam organisasi, bisnis, dan institusi lainnya. Unit pengawasan internal organisasi memainkan peran penting dalam mengawasi seberapa ketat standar operasional organisasi ditegakkan. Oleh karena itu, perusahaan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengendalian internalnya, seperti pekerjaan auditornya (Yusrianti et al., 2020). Perhatikan jumlah anggota audit internal jika Anda ingin mengetahui seberapa baik sistem pengendalian internal Anda bekerja. Hal ini sejalan dengan temuan Agustina & Pratomo (2019), yang menemukan bahwa memiliki terlalu banyak orang dalam tim pengawas atau dalam audit internal dapat membuat pengawasan terhadap organisasi yang kompleks menjadi kurang efektif, yang pada gilirannya dapat menimbulkan peluang terjadinya kecurangan. Untuk menghindari korupsi, kita harus memiliki sistem pengendalian internal yang efisien dan efektif.

Kompetensi: Ketika latar belakang pendidikan, posisi, atau fungsi seseorang dalam organisasi menjadi faktor dalam kemampuannya untuk melakukan tindakan korupsi, maka kita dapat mengatakan bahwa korupsi didorong oleh kompetensi. Serat moral seseorang dapat sangat membantu dalam mencegah korupsi yang berkaitan dengan kompetensi, tetapi budaya kerja yang lebih bermoral yang berakar pada prinsip-prinsip agama juga dapat membuat perbedaan. Setiap orang harus menyadari bahwa keahlian mereka harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan, bukan sebaliknya.

Ketika ketidakjujuran berasal dari upaya seseorang untuk merasionalisasi tindakannya, hal ini dikenal sebagai korupsi rasionalisasi (Suryandari et al., 2019). Penjahat yang melakukan kecurangan sering kali membenarkan perilaku mereka dengan mengasumsikan hal-hal tertentu, seperti bahwa kecurangan adalah praktik umum dan banyak organisasi yang terlibat di dalamnya, bahwa korban kecurangan tidak terpengaruh oleh kejahatan mereka, dan bahwa korban kecurangan layak mendapatkan perlakuan khusus (Darwati, 2019). Oleh karena itu, untuk menghindari masalah ini, organisasi, bisnis, agensi, atau lembaga harus bekerja untuk meningkatkan standar moral dan etika semua anggotanya. Jika semua orang di dalam lembaga tersebut jujur dan berterus terang, maka organisasi tersebut akan dapat membedakan antara hal-hal yang akan membantu dan hal-hal yang akan merugikan, dan sebaliknya, sehingga ketidakjujuran tidak akan pernah dibenarkan.

Jika korupsi berasal dari rasa penting diri seseorang yang berlebihan, biasanya karena dia egois dan percaya bahwa mereka layak mendapatkan perlakuan khusus dari organisasi karena kecerdasan dan posisinya yang superior (Danuta, 2017). Pemimpin

memiliki wewenang untuk mengganti atau memecat karyawan jika, setelah memberikan pengarahan kepada mereka tentang bagaimana menjadi orang yang lebih baik di tempat kerja, korupsi karena kesombongan tetap terjadi. Ini adalah salah satu cara untuk mencegah tindakan korupsi yang disebabkan oleh arogansi.

Organisasi, bisnis, institusi, dan lembaga pemerintah dapat menggunakan pengetahuan tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kecurangan dan korupsi-termasuk lima komponen dari Teori Pentagon Penipuan-untuk menginformasikan upaya mereka dalam memerangi kejahatan dan kecurangan ini.

Kasus Fraud/Korupsi yang terjadi

Peranan Akuntansi Forensik

Kasus korupsi yang melibatkan PT. Asuransi Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) Tbk, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 23,7 triliun, adalah salah satu dari beberapa contoh mengerikan dari kecurangan di Indonesia (Merdeka, 2021). Contohnya adalah korupsi PT Jiwasraya, penipuan laporan keuangan PT Aqua, pemolesan laporan keuangan PT Garuda Indonesia, suap pengadaan peralatan dan perlengkapan PT Krakatau Steel, dan sebagainya. Demikian pula, ada korupsi selama epidemi COVID-19, yaitu penipuan terkait pandemi yang merugikan negara sebesar 100 juta dolar AS. Menteri Sosial Indonesia, Juliari Batubara, diduga terlibat dalam masalah korupsi di mana ia mendapatkan total Rp 17 miliar dalam bentuk pasokan makanan dari dua program bantuan sosial (CNNIndonesia.com, 2021). Namun, akuntansi forensik belum pernah disebutkan sebelumnya sebagai alat untuk menemukan kasus-kasus ini.

Ketika PricewaterhouseCoopers (PwC) mengungkapkan kasus Bank Bali dengan menggambarkan pergerakan uang tunai yang rumit sebagai diagram sunburst, akuntansi forensik menjadi lebih menonjol dibandingkan dengan kasus-kasus lainnya. Selain itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dapat membuktikan di pengadilan bahwa Andrian Waworuntu terlibat dalam penggelapan L/C BNI senilai Rp1,3 triliun karena menggunakan teknik Follow the Money, yang juga digunakan oleh PwC dalam kasus Bank Bali (Sayyid, 2015).

Hasil Survei

Korupsi merupakan bentuk fraud yang paling banyak terjadi di Indonesia, menurut survei ACFE Indonesia. Dari 154 orang yang berpartisipasi dalam survei FraudIndonesia, 67 persen memilih korupsi. Penyalahgunaan aset adalah bentuk kecurangan yang paling banyak terjadi, menurut Laporan ACFE untuk Bangsa-Bangsa (2016). Hal ini bertentangan dengan hasil laporan tersebut. Di antara berbagai bentuk kecurangan yang mungkin terjadi di Indonesia, 71 orang (atau 31% dari total responden) memilih penyalahgunaan aset. Bentuk kecurangan yang paling umum ketiga, menurut empat responden (atau 2% dari total responden), adalah kecurangan laporan keuangan. Tingkat keahlian dan latar belakang responden yang berbeda-beda menjelaskan variasi ini.

SIMPULAN

Dalam kesimpulan artikel ini, ditekankan bahwa akuntansi forensik memainkan peran yang sangat penting dalam pendeteksian dan pencegahan kecurangan di sektor pemerintahan. Seiring dengan tingkat kecanggihan aktivitas kecurangan yang terus meningkat, khususnya di Indonesia, penggunaan akuntansi forensik menjadi kebutuhan mutlak untuk mengatasi tantangan ini. Fraud di sektor publik tidak hanya menyebabkan kerugian pada keuangan negara, tetapi juga berpotensi merusak wibawa institusi pemerintah dan menimbulkan keresahan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan metode yang efisien untuk mengidentifikasi dan mencegah terjadinya kecurangan.

Disiplin ilmu akuntansi, audit, dan investigasi disatukan dalam bidang akuntansi forensik, yang bertujuan untuk menemukan, menilai, dan memberikan bukti adanya praktik-praktik kecurangan. Pendeteksian anomali dalam laporan keuangan telah terbukti berhasil melalui penggunaan metode seperti analisis rasio, analisis tren, dan pemeriksaan transaksi. Dengan penerapan akuntansi forensik, diharapkan para pengambil keputusan dalam pengelolaan sumber daya publik dapat memperoleh wawasan yang berharga, dan kemungkinan terjadinya kecurangan dapat dikurangi melalui peningkatan keterbukaan dan pengawasan.

Artikel ini juga membahas beberapa hambatan yang terkait dengan implementasi akuntansi forensik. Tantangan-tantangan ini termasuk fakta bahwa lembaga-lembaga pemerintah tidak sepenuhnya memahami pentingnya akuntansi forensik dan kendala-kendala yang ditempatkan pada sumber daya yang tersedia. Untuk menemukan solusi atas masalah-masalah ini, pemerintah, lembaga pendidikan, dan kelompok-kelompok non-pemerintah perlu bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran dan meningkatkan kemampuan di bidang ini. Pendidikan akuntansi forensik di tingkat universitas juga

sangat penting untuk menghasilkan individu-individu yang kompeten di bidangnya.

Terakhir, salah satu aspek yang paling penting dalam pencegahan kecurangan adalah mempromosikan budaya yang berusaha untuk menghilangkan korupsi di masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan. Diharapkan bahwa kecurangan di sektor pemerintah dapat dikurangi dengan penerapan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Hal ini akan menghasilkan penciptaan lingkungan yang lebih dapat dipercaya dan transparan bagi masyarakat umum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran umum mengenai pentingnya akuntansi forensik dalam pengembangan integritas publik dan penghapusan aktivitas kecurangan di sektor publik.

Dokumen ini, secara keseluruhan, menyarankan pembuatan metodologi dan prosedur yang lebih baik untuk akuntansi forensik, serta edukasi yang berkesinambungan untuk semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan publik, dalam rangka membangun sistem yang lebih efisien dalam mengidentifikasi dan mencegah kecurangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., & Albrecht, C. (2019). *Fraud Examination*. Cengage Learning.
- Arianto, dkk. (2023). *Akuntansi Forensik*. Padang :GETPRESS INDONESIA.
- Beasley, M. S., Carcello, J. V., & Hermanson, D. R. (2018). *Fraudulent Financial Reporting: Consideration of Industry Traits and Corporate Governance Mechanisms*. *Contemporary Accounting Research*.
- BPKP. (2023). *Laporan Tahunan BPKP*. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- CNNIndonesia.com. (2021). *Duduk Perkara, Jejak Juliari, Menteri Korupsi Uang Jatah Rakyat Kala Pandemi*.
- Febriyanti, D., & Syarif, D. (2023). *Efektifitas Peran Akuntan Forensik Dalam Mengatasi Fraud: Analisis Fraud Pentagon Theory*. *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen*, 19(4), 970-971.
- Garrison, R. H. (2020). *Managerial Accounting*. McGraw-Hill Education.
- Halim, A. (2021). *Pengembangan Kurikulum Akuntansi Forensik di Perguruan Tinggi*. *Jurnal Pendidikan Akuntansi*.
- Harnovinsah. (2019). *Metodologi Penelitian*. Pusat Bahan Ajar Dan Elearning, 3–5.
- Hughes, R. (2008). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kopetensi Dan Praktiknya*. *Journal*

of Information and <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

- Ihulhaq, N., Sukarmanto, E., & Purnamasari, P. (2019). Pengaruh Akuntansi Forensi dan Audit Investigasi terhadap Pendeteksian Fraud. *Jurnal Prosiding Akuntansi*.
- KPK. (2022). Laporan Tahunan KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Kranacher, M. J., Riley, R. A., & Wells, J. T. (2011). *Forensic Accounting and Fraud Examination*. John Wiley & Sons.
- Lidyah, R. (2016). Korupsi Dan Akuntansi Forensik. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 2(2), 72–91.
- Merdeka. (2021). Kronologi Terkuaknya Kasus Korupsi Asabri, Terbesar Sepanjang Sejarah Indonesia.
- Mursalin. (2013). Peran Audit Forensik Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 10(2), 43–58.
- Mustori, M. (2012). Pengantar Metode Penelitian (Vol. 2, Issue January 2012).
- Rizki, B. F., Purnamasari, P., & Oktaroza, M. L. (2017). Pengaruh Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi Terhadap. *Prosiding Akuntansi*, 3(2), 513–524.
- Sayyid, A. (2015). Pemeriksaan fraud dalam akuntansi forensik dan audit investigatif. *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(2).
- Singleton, T. W., & Singleton, A. J. (2018). *Fraud Auditing and Forensic Accounting*. Wiley.
- Toeweh, B,H,. (2022). Literature Review: Akuntansi Forensik Untuk Deteksi Korupsi (Forensic Accounting for Corruption Detection: A Literature Review). *Jurnal Studi Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*, 2(2), 135-146.
- Transparency International. (2022). Corruption Perceptions Index. Retrieved from [Transparency International].
- Wells, J. T. (2020). *Principles of Fraud Examination*. Wiley
- Yulistianingsih, A.R.D., Hadi, F., Nurhabiba, Suhartono. (2020). Peranan Akuntan Forensik Dalam Mengatasi Fraud dan Korupsi di Lembaga Pemerintahan. *Jurnal Islamic Accounting and Finance Review*, 1(2), 140.